



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KUNTORO BOGA ANDRI
2. Jabatan : KEPALA BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
3. NHK : 633355

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 8.090.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 306 m²/150 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.955.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 223 m²/62.4 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.105.000.000
3. Tanah Seluas 3221 m² di KAB / KOTA PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
4. Tanah Seluas 3238 m² di KAB / KOTA PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
5. Tanah Seluas 250 m² di KAB / KOTA PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m²/85 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.405.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m²/250 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.105.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 101.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. 221.000.000

Sub Total

Rp. 8.412.000.000

III. HUTANG

Rp. 490.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.922.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURYA YUNYATI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 897587

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.300.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HIBAH TANPA AKTA Rp. 450.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/101 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	148.000.000
1. MOTOR, YAMAHA 2DP/YAMAHA NMAX 150 ABS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S MT (F700RE-GMMFJ) Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 129.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	92.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	46.034.283
F. HARTA LAINNYA	Rp.	125.000.000
Sub Total	Rp.	1.711.734.283
III. HUTANG	Rp.	120.804.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.590.930.283

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YERRY IRAWAN
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 717312

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	129.630.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/60 m2 di KAB / KOTA BOGOR, LAINNYA Rp. 129.630.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	201.220.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA RUSH SUV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 175.520.000		
3. MOTOR, YAMAHA MX KING Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 22.700.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	214.267.639
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	545.117.639
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	545.117.639

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARYONO**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENERIMA**
3. NHK : **494997**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **273.114.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/21 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 169.920.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m²/42 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 103.194.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **205.500.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **---**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **2.979.541**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **481.593.541**

III. HUTANG Rp. **50.312.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **431.281.541**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : TUTY HERAWATI
- Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
- NHK : 225394

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	143.230.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m ² /75 m ² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 143.230.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	289.650.000
1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA ALL NEW V ELOZ Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 287.650.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	24.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	842.843
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	457.722.843

III. HUTANG Rp. 100.000.000

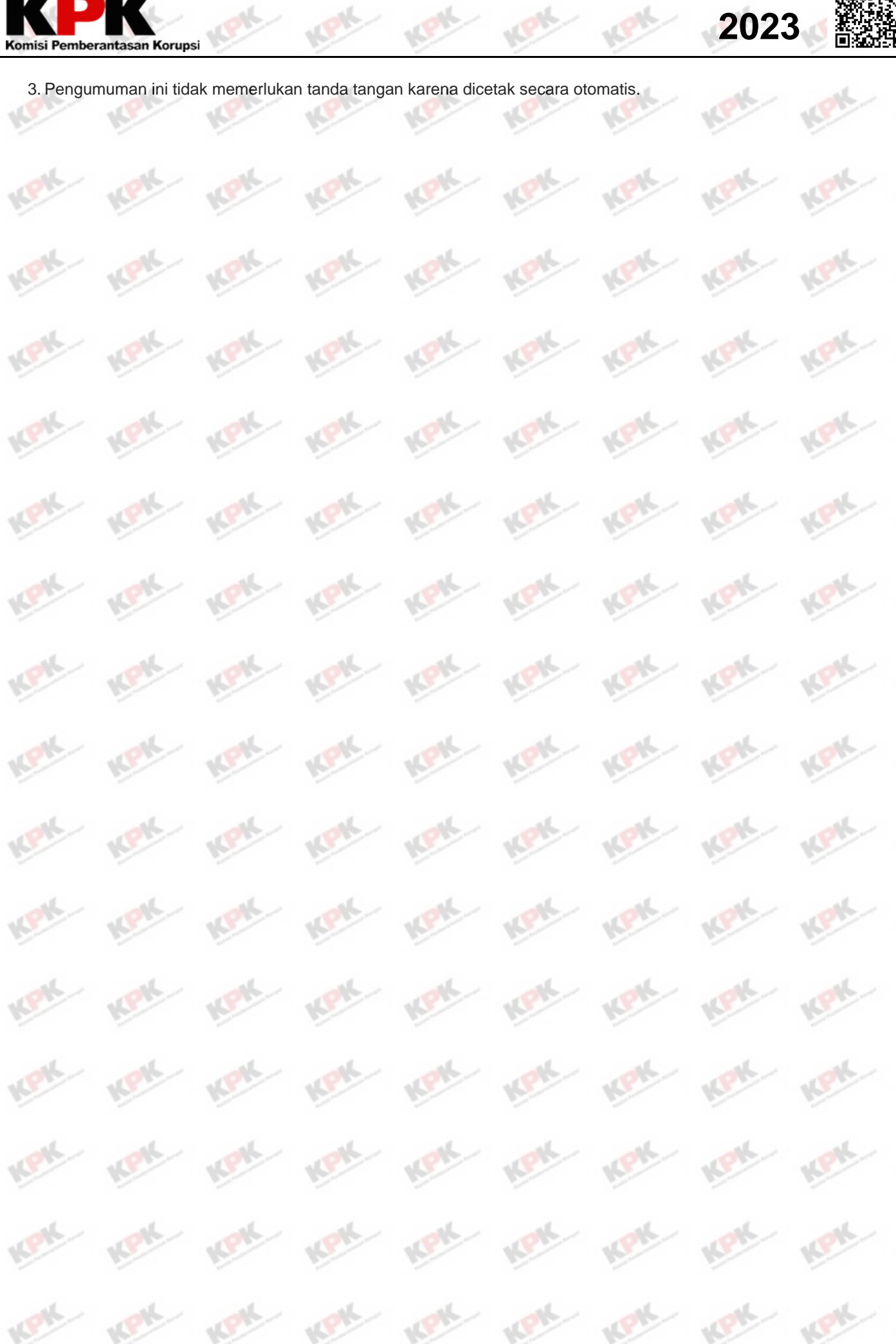
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 357.722.843

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2024/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN**UNIT KERJA** : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**I. DATA PRIBADI**

- Nama : YUSNIARTI
- Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
- NHK : 411318

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.600.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 150.000.000

- MOBIL, HONDA HR-V MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 85.400.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 876.496.341**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 3.711.896.341**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.711.896.341**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

